

### **BAB III**

#### **TEMUAN PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan temuan hasil lapangan mengenai strategi komunikasi politik Partai Fretilin untuk koalisi membentuk pemerintahan periode 2017-2022, yang merupakan gabungan dari hasil penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung, dimana mendatangi langsung kepada subyek penelitian secara mendalam. Subyek yang dimaksud dalam penelitian adalah para tim dialog partai politik yang partainya mendapatkan kursi di Parlemen Nasional periode 2017-2022. Yaitu : Partai Fretilin, CNRT, PLP, Partai Demokrat, dan KHUNTO yang mulai pada tanggal 4 April sampai 23 Mei 2018.

Hasil penelitian tentang “Strategi komunikasi politik Partai Fretilin untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022” terdiri dari bagaimana langkah-langkah komunikasi politik partai Fretilin untuk koalisi membentuk pemerintahan dan Strategi Pesan yang disampaikan Partai Fretilin kepada Partai CNRT, PLP, Partai Demokrat, dan KHUNTO. Hasil dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Fretilin, bagaimana Partai Fretilin memutuskan untuk berkoalisi, Pembentukan pemerintahan, dan pemerintahan ( Kabinet yang dipimpin oleh Mari Alkatiri ) Timor Leste periode 2017-2022.

Langkah-langkah komunikasi partai politik Fretilin untuk koalisi membantukan pemerintahan periode 2017-2022

### **3.1. Partai Fretilin sebagai komunikator**

Setelah mendengar hasil keputusan dari badan Pengadilan tinggi pada tanggal 1 Agustus 2017, Partai Fretilin melakukan komunikasi politik pada tanggal 2 Agustus 2017 Partai Fretilin mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik sebagai kepala negara, untuk melaporkan hasil pemilihan yang telah di umumkan oleh badan pengadilan tinggi.

Partai Fretilin Sebagai Komunikator Politik menyampaikan pesan politik Untuk membentuk pemerintahan melalui lobi dan dialog yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 Agustus 2017 dengan partai –partai politik untuk koalisi membentuk pemerintahan. (Arifin, 2006: 97-98) antara politikus yang berbeda pendapat harus membuka berbagai kemungkinan, sebab yang dicari adalah konsensus politik atau solusi politik dari adanya konflik politik. Dalam hal ini diperlukan kiat atau seni tersendiri untuk mendapatkan konsensus.

### **3.2. Pesan atau program yang disampaikan Partai Fretilin**

Pesan politik Partai Fretilin diantaranya untuk koalisi adalah:

1. Pemerintahan Inklusif dan insiden dalam Parlemen Nasional yang dimana konsep Partai Fretilin menginginkan pemerintahan yang terdiri dari partai politik, profesional, dan intelektual.
2. Program pemerintahan berasal dari Partai Fretilin dan program partai politik yang sesuai dengan program Partai Fretilin. Dengan demikian semua program partai demi kepentingan masyarakat digabungkan menjadi

program pemerintahan yang akan dilaksanakan pemerintahan inklusif periode 2017-2022 yang dipimpin Partai Fretilin

3. Program yang disampaikan Partai Fretilin *Planu Desenvolimento Nasional ( PDN )* perencanaan pembangunan Nasional diambil dari program kerja Partai CNRT dari tahun 2011 – 2030 yang sudah disahkan di Parlemen Nasional pada itu Partai Fretilin menolak dan keluar dalam sidang Parlemen Nasional.
4. Program tentang *Planu Nasional Desenvolimento suku (PNDS)* Perencanaan Nasional pembangunan Desa diambil dari program Partai CNRT.
5. Program yang disampaikan oleh Partai Fretilin baik namun dalam pemilihan umum Partai Fretilin mendapatkan kursi 23 dan Partai CNRT 22 kursi dari 65 kursi yang ada di Parlemen Nasional. Oleh karena itu Partai Fretilin mengadakan komunikasi politik dengan Partai politik PLP, PD, dan KHUNTO untuk memenuhi salah satu syarat di Parlemen Nasional.
6. Semua Program bisa dikatakan baik namun minoritas dalam Parlemen Nasional tidak berhasil karena konstitusi tidak mengijinkan.
7. Program yang disampaikan oleh Partai Fretilin melanjutkan program pemerintahan yang sudah disetujui di Parlemen nasional pada periode 2012- 2017 dimana pada waktu program tersebut merupakan program

dari koalisi Partai CNRT dan Partai Demokrat yang sudah disetujui di Parlemen nasional.

### **3.3. Saluran**

Saluran yang digunakan oleh Partai Fretilin adalah melakukan lobi dengan dialog lobi dan dialog di mulai dari tanggal 9-12 Agustus 2017 Partai Fretilin telah mengadakan komunikasi politik dengan melalui saluran lobi dan dialog/pertemuan antara Partai politik CNRT, PLP, PD dan KHUNTO. Yang di adakan di Hotel Novo Turismo dili dan hotel Ramelau.

#### **1.4. Penerima Pesan**

Partai Fretilin melakukan lobi politik dengan partai politik yang mendapat kursi di Parlemen Nacional yang dimulai pada tanggal 9–12 Agustus 2017 dengan Partai Politik sebagai berikut :

##### **1.4.1. Pertemuan Partai Fretilin, dengan CNRT.**



*Gambar 1. Pertemuan antara Partai FRETILIN dengan Partai CNRT*

Partai Politik Congresso Nacional de Reconstrução de Timor Leste (CNRT)

Pada tanggal 9 Agustus 2017 dalam pertemuan tersebut Fretelin mengajak Partai CNRT untuk berpartisipasi dalam pemerintahan . Hal-hal yang dibicarakan tidak terlepas dari apa yang telah dikampanyakan pada saat kampanye berlangsung dan pada saat itu Partai Fretelin mengajak Partai CNRT untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang semua komponen kaum intelektual Partai dan professional mengambil bagian dalam pemerintahan( *inclusive* ) yang akan dipimpin Partai Fretelin. Hal yang disampaikan oleh salah satu kader Partai Politik CNRT masih menunggu keputusan dari ketua umum. Karena pada waktu itu ketua Umum tidak hadir dan masih menunggu konferensi yang akan diadakan dalam waktu yang dekat. Pertemuan kedua dengan Partai CNRT mengatakan Bahwa CNRT mengambil sikap politik CNRT akan menjadi partai politik oposisi di Parlemen Nasional dan menjadi opsisi yang konstruktif dan edukatif di Parlemen Nasional dan tidak mengundang partai lain untuk membentuk koalisi di Parlemen nasional dan koalisi Untuk membentuk pemerintahan. Hal senada juga disampaikan oleh Presiden Partai Politik Xanana Gusmão pada pertemuan dengan ketua umum partai Fretelin di hotel Novo Turismo bahwa CNRT tetap pada prinsip menjadi partai oposisi yang Konstruktif dan edukatif di Parlemen Nasional.

#### 1.4.2. Pertemuan Politik Partai Fretilin, dengan PLP



*Gambar.2 Komunikasi Politik Partai FRETILIN dengan PLP*

Pada tanggal 10 Agustus 2017 Partai Fretilin mengundang Partido Libertação Popular (PLP) untuk membicarakan keikutsertaan dalam pemerintahan, dalam pertemuan tersebut ketua umum partai PLP mengatakan bahwa ada niat untuk bergabung dengan Partai Fretelin untuk pembentuk pemerintahan. Namun dalam pertemuan yang kedua Presiden PLP tidak hadir dan diwakili oleh wakil Presiden PLP Fidelis Magalhães dan pada saat itu dari PLP menyampaikan agar dalam Pemerintahan pembagian dalam kabinet yang merata sesuai dengan proporsinya dan PLP pada saat pertemuan menyampaikan bahwa apabila dalam pemerintahan Perdana Menteri berasal dari Partai Fretilin maka Presiden Parlemen Nasional berasal dari PLP. Usulan tersebut Partai Fretilin sebagai Partai pemenang dalam Pemilihan Umum menerima usulan tersebut akan tetapi jika yang Presiden Parlemen itu dari Presiden PLP Taur Matan Ruak, namun PLP memutuskan Wakil Presiden Partai yakni Fidelis Magalhães untuk menjadi

presiden Parlemen nasional. Dengan begitu Fretilin menolak dengan usulan dari Partai PLP. Dengan begitu PLP mengundurkan diri dari koalisi.

#### **1.4.3. Pertemuan Politik Fretilin dengan Partai Demokrat**



*Gambar 3.komunikasi Politik Partai Fretilin dengan Partai Demokrat*

Partai Demokrat dalam pertemuan itu Presiden Partai Politik mengatakan bahwa dari dulu sampai sekarang Partai Politik Demokrat siap bekerja Sama dengan partai Politik manapun untuk turut serta ambil bagian di Pemerintahan, karena Partai Demokrat mempunyai prinsip bahwa untuk pemimpin negara dan pemerintahan itu milik masyarakat. Dengan demikian maka partai politik Demokrat siap turut ambil bagian dalam pemerintahan. Partai Demokrat dan Partai Fretilin menyetujui Koalisi Pemerintahan dan menandatangani kesempatan.

#### 1.4.4. Pertemuan Partai Fretilin dengan KHUNTO



*Gambar 4. Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO)*

Ketua umum mengatakan dalam dialog yang diadakan oleh Partai Fretilin bahwa Partai KHUNTO mengatakan kami siap bekerja sama dengan siapa saja dan partai manapun untuk memberikan solusi untuk pembentukan pemerintahan ke VII dalam negara Timor Leste, kami siap bekerja sama dengan semua partai politik dan menjadi partner yang baik untuk membentuk pemerintahan. Oleh karena itu untuk pembentukan pemerintah itu adalah hak Partai Fretilin.



## **1.5. Efek komunikasi politik**

### **1.5.1. Partai CNRT.**

1. Berdasarkan janji yang di sampaikan pada saat kampanye politik Partai CNRT bahwa CNRT apabila dalam pemilihan tidak mendapatkan suara mayoritas maka Partai CNRT akan menjadi Partai oposisi di Parlemen Nasional.
2. Berdasarkan hasil keputusan konferensi Partai CNRT pada tanggal 5 September 2017 Partai CNRT akan menjadi partai oposisi yang konstruktif dan edukatif (menjadi partai posisi yang membangun dan berpendidikan) di Parlemen Nasional dan tidak mengundang partai politik manapun untuk koalisi di Parlemen Nasional dan tidak mengundang partai manapun untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022

### **1.5.2. PLP.**

1. Dalam pertemuan yang kedua Presiden PLP tidak hadir dan diwakili oleh wakil Presiden PLP Fidelis Magalahaes dan pada saat itu dari PLP menyampaikan agar dalam Pemerintahan pembagian dalam kabinet yang merata sesuai dengan proporsinya dan PLP pada saat pertemuan menyampaikan bahwa apabila dalam pemerintahan perdana menteri berasal dari Partai Fretilin maka Presiden Parlemen Nasional berasal dari PLP. Usulan tersebut Partai Fretilin sebagai Partai pemenang dalam Pemilihan Umum menerima usulan tersebut akan tetapi jika yang Presiden Parlemen itu dari Presiden PLP Taur Matan Ruak, namun PLP memutuskan Wakil Presiden Partai yakni Fidelis Magalaens untuk menjadi Presiden Parlemen nasional. Dengan begitu Fretilin menolak

dengan usulan dari Partai PLP. Dengan dan akhirnya PLP mengundurkan diri dari koalisi. Alasan yang lain PLP mengundurkan diri dari koalisi adalah Partai Fretilin lebih mengharapkan dukungan dari Xanana Gusmão

2. Dalam wawancara dengan media TAFARA Presiden PLP mengatakan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Fretilin dengan Partai PLP gagal dengan alasan tidak ada pembagian yang merata dalam pemerintahan.
3. Tidak Jelas konsep koalisi Pemerintahan yang ditawarkan oleh Partai Fretilin dengan PLP.
4. Partai Fretilin juga mengundang Partai Demokrat untuk membentuk pemerintahan *inklusive*.
5. Partai Fretilin juga mengundang Partai CNRT untuk membentuk Pemerintahan dengan konsep *insidenti* Parlemen Nasional ( mengharapkan CNRT mendukung dalam Parlemen Nasional )
6. Program yang akan dilaksanakan semua dari Program kerja dari Partai Fretilin tidak ada pembagian yang merata dalam pemerintahan.
7. Karena usulan yang disampaikan dari PLP tidak diterima oleh Partai Fretilin.
8. Partai Fretilin tidak menghargai Presiden PLP dan lebih mengharapkan dukungan dari Xanana Gusmão
9. usulan yang disampaikan dari PLP tidak diterima oleh Partai Fretilin

Dari hasil pertemuan tersebut maka Partai Fretelin memutuskan bahwa mengundang kembali Partai Politik PLP dan KHUNTO untuk membicarakan hal-hal yang penting dan cocok yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan untuk koalisi pembentukan pemerintahan. Dalam pertemuan kedua PLP menyatakan untuk mengundurkan diri dari koalisi sebab PLP mengusulkan ada pembagian kursi di Pemerintahan yang merata sesuai dengan proporsinya dalam Parlemen Nasional dan PLP mengusulkan apabila perdana menteri dari Partai Fretelin maka presiden Parlemen nasional dari PLP yaitu wakil presiden PLP Fidelis Magalhães. Namun usulan tersebut di tolak mentah-mentah oleh Partai Fretelin.

#### **1.6. Partai Fretelin memutuskan untuk berkoalisi**

Hasil lobi yang dilakukan Partai Fretelin dari tanggal 9-11 Agustus 2017 Partai Fretelin memutuskan: untuk koalisi dengan Partai Demokrat, dan KHUNTO untuk membentuk koalisi dengan alasan:

1. Berdasarkan hasil pemilihan bahwa Partai Fretelin unggul dalam Pemilihan.
2. Berdasarkan konstitusi RDTL Pasal 106 (Pengangkatan) 1. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional. Partai politik dalam pemilihan yang mendapatkan suara terbanyak maka berhak untuk menyusun pemerintahan. oleh karena itu Presiden Republik melantik

Perdana Menteri Mari Alkateri dan para Menteri pada periode 2017 – 2022

3. Prinsip bahwa CNRT akan menjadi partai oposisi di Parlemen Nasional yang konstruktif dan Edukatif.
4. Presiden CNRT memberikan dorongan kepada Mari Alkateri untuk memimpin Pemerintahan.
5. Pembentukan Pemerintahan Partai Fretilin dengan Partai Demokrat akan mendapatkan dukungan dari Partai CNRT, PLP dan KHUNTO.
6. Presiden Republik percaya bahwa akan ada dukungan dari partai-partai politik dalam Parlemen Nasional demi kepentingan negara.
7. Koalisi dalam Parlemen Nasional Partai KHUNTO ikut serta dalam koalisi Parlemen Nasional yang terdiri dari Presiden Parlemen Nasional dari Partai Fretilin, wakil pertama Presiden Parlemen Nasional diambil dari Partai Demokrat, dan Wakil kedua diambil dari Partai KHUNTO. Sedangkan berkoalisi untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022 Partai KHUNTO mengundurkan diri.
8. Partai Demokrat untuk berkoalisi karena Prinsip Partai untuk masyarakat Timor Leste Partai Demokrat siap untuk melayani (*Ba Timor nudar maubere oan sempre pronto*), Partai Demokrat ingin menyelamatkan pemerintahan agar tidak terjadi pemilihan ulang.
9. Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Fretilin dengan alasan Partai Demokrat mempunyai Prinsip untuk masyarakat Timor Leste Partai Demokrat siap untuk melayani.

10. Partai Demokrat berasal dari Partai Fretilin Partai Fretilin bapak dan Partai Demokrat sebagai anaknya Partai Demokrat merupakan generasi penerus Partai Fretilin

Dengan demikian Partai Fretilin dan Partai Demokrat berkoalisi yang dalam Parlemen Nasional terdiri dari 30 kursi dari 65 yaitu Partai Fretilin 23 kursi dan Partai Demokrat 7 kursi di Parlemen Nasional.

### **3.7. Pembentukan pemerintahan**

Pembentukan pemerintahan Timor Leste periode 2017-2022 terdiri dari:

1. Partai Fretilin maju dengan Partai Demokrat untuk membentuk pemerintahan periode 2017-2022
2. Untuk membentuk pemerintahan Partai KHUNTO mengundurkan diri dari pembentukan pemerintahan. Dalam wawancara dengan salah satu media lokal GMNTV dengan Penasehat KHUNTO mengatakan Jose Ramos Horta sebagai salah satu tim komunikasi politik dari Fretilin menelpon kepada penasehat Partai KHUNTO Naimori Bukar mengatakan bahwa dalam pembentukan pemerintahan Partai Fretilin tidak membutuhkan partai KHUNTO karena tidak memiliki sumberdaya Manusia untuk turut dalam ambil bagian di kabinet pemerintahan 2017- 2022, Naimori ( Tafara 14:9: 2017 )
3. dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan adanya diskriminasi oleh partai Fretilin terhadap Partai KHUNTO
4. Tidak ada konsensus Politik dalam pembentukan pemerintahan. antara Partai Fretilin dan KHUNTO sebab ada 2 konsensus politik yaitu :

Konsensus dalam Parlemen Nasional dan Konsensus dalam Pemerintahan yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mari Alkateri dari Partai Fretilin

### 1.7. Pemerintahan Timor Leste periode 2017-2022.



#### *Pemerintahan Timor Leste periode 2017-2022*

Pemerintahan yang dibentuk oleh koalisi Partai Fretilin dan Partai Demokrat adalah pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi RDTL Pasal 106 (Pengangkatan) Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional Dalam pembentukan pemerintahan Partai Fretilin dengan Partai Demokrat Membentuk koalisi Pemerintahan, bisa dikatakan pemerintahan dibentuk dalam minoritas di

Parlemen Nasional. Hal ini mengakibatkan dalam Parlemen Nasional tidak mengesahkan anggaran negara dan pemerintahan dinyatakan gagal, melakukan pemilihan ulang. Oleh karena itu Blok AMP meminta kepada Presiden Republik memberikan kepada Blok oposisi agar membentuk pemerintahan yang terdiri dari partai CNRT, PLP, dan KHUNTO dengan alasan:

1. Pembentukan Pemerintahan yang dipaksakan.
2. Pembentukan Pemerintahan normalnya untuk Lima tahun akan tetapi adanya Perbedaan politik maka pemerintahan jatuh dan masyarakat Timor Leste melakukan pemilihan ulang.
3. Partai CNRT meminta Presiden Republik memberikan kesempatan kepada Partai CNRT untuk membentuk Pemerintahan yang terdiri dari Partai CNRT, PLP, dan KHUNTO yang memenuhi syarat di Parlemen Nasional yaitu 35 kursi dari 65 kursi yang ada di Parlemen Nasional :
4. Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional berdasarkan Konstitusi RDTL pasal 85 f) Membubarkan Parlemen Nasional, apabila terdapat krisis kelembagaan yang parah, yang menghalangi pembentukan Pemerintah atau pengesahan Anggaran Negara, dan yang berlangsung lebih dari enam puluh hari, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang memiliki kursi di Parlemen, dan dengan Dewan Negara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 100, agar tindakan pembubaran tidak dinyatakan tidak sah dan kemudian dibatalkan;